Bandar Maulana
Jurnal Sejarah Kebudayaan
Vol. 30, No. 2, Oktober 2025
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/BandarMaulana

PENGORGANISASIAN PEMOGOKAN BURUH OLEH SARBUPRI PADA TAHUN 1950 MENURUT TEORI SERIKAT PEKERJA ANTONIE PANNEKOEK

Ghina Nazla Salsabila
Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma
Jl. STM Pembangunan No. 10, Mrican, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta
Email: ghinamj@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pemogokan buruh yang diorganisasi oleh Sarbupri pada tahun 1950. Kasus pemogokan yang menjadi salah satu peristiwa terbesar di Indonesia ini dianalisis dengan teori dari Antonie Pannekoek, seorang teoritikus Marxis yang menjabarkan beberapa aspek mengenai pemogokan buruh, yaitu tugas para buruh (*The Task*), perjuangan para buruh (*The Fight*), dan musuh para buruh (*The Foe*). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa zaman depresi yang terjadi membuat kondisi sosial buruh makin terpuruk. Selama ini, gaji buruh perkebunan tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari, sehingga memicu tuntutan untuk kenaikan gaji sebesar *f* 3,50 yang dilayangkan ke asosiasi perusahaan perkebunan, *Algemeen Landbouw Syndicaat* (ALS). Tuntutan yang tak kunjung diterima membuat Sarbupri mengeluarkan perintah untuk melakukan mogok masal bagi 700.000 anggotanya. Pemogokan berakhir ketika perseteruan kedua pihak dimediasi oleh pemerintah. Dalam perundingan ini Sarbupri harus berkompromi untuk menerima kenaikan gaji hanya sebesar R. 3,-.

Kata Kunci: *pemogokan buruh, Sarbupri, Marxisme, Antonie Pannekoek*

ABSTRACT

This study discusses a major labor strike organized by Sarbupri in 1950. The strike case, which became one of the biggest events in Indonesia, is examined through Antonie Pannekoek's Marxist theory, focusing on three key concepts: the workers' task (The Task), the workers' struggle (The Fight), and the enemy of the workers (The Foe). The results of the study reveal that the economic depression made the social conditions of workers even worse. The wages were insufficient to meet daily needs, triggering a demand for a wage increase of f 3.50, addressed to the plantation company association, Algeemen Landbouw Syndicaat (ALS). With no response to this demand, Sarbupri issued an order to hold a mass strike to its 700.000 members. The strike ended when the government brought both sides to the negotiation table. In this negotiation, Sarbupri had to compromise and accept a salary increase of only R. 3,-.

Keywords*: *labor strike, Sarbupri, Marxism, Antonie Pannekoek

PENDAHULUAN

Aksi massa dalam bentuk pemogokan merupakan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme yang mulai marak dipraktikkan di Indonesia pada awal abad ke-20, khususnya pada tahun 1920-an. Namun, sayangnya setelah pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1926-1927 terhadap pemerintah Hindia Belanda, aksi massa pun mengalami momen surut akibat zaman depresi dan represifitas pemerintah kolonial. Aksi massa mulai bangkit kembali setelah Indonesia merdeka. Pengorganisasian masyarakat dari berbagai kalangan kembali dilakukan, salah satunya adalah dari kalangan buruh proletar yang bekerja di perkebunan. Dimulai tahun 1947, para buruh perkebunan di Sumatera dan Jawa sebagian besar tergabung dalam Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) yang pada awal pembentukannya merupakan organisasi independen dan otonom.

Pada 1950, Sarbupri mampu menggalang massa sebanyak 700.000 orang untuk menuntut kenaikan upah bagi kesejahteraan buruh. Tuntutan ini ditujukan kepada asosiasi perusahaan Belanda, *Algemeen Landbouw Syndicaat* (ALS). Asosiasi ini sempat bersitegang dengan Sarbupri dalam pemenuhan tuntutan kenaikan upah (*Kedaulatan Rakjat*, 15 September 1950). Sarbupri pun berhasil mengorganisasi pemogokan yang dilakukan lebih dari 1 bulan di daerah Sumatera, Jawa, dan Madura (*Kedaulatan Rakjat*, 27 September 1950).

Pemogokan yang diorganisasi oleh Sarbupri ini merupakan aksi massa yang terbesar pasca kemerdekaan. Pemogokan ini juga menggegerkan kedua pihak, baik Indonesia sebagai negara yang baru dilahirkan, maupun Belanda yang masih ingin mengkolonisasi Indonesia melalui imperialisme gaya lama dengan serangan agresi militernya, dan kolonialisme model baru yang salah satu wujudnya adalah melalui jalur penetrasi ekonomi (Gardner & Roy, 2020:148). Perlawanan serikat pekerja ini sebagian besar telah terlupakan dalam lembar sejarah Indonesia, tetapi karena signifikansinya, penelitian ini ditulis untuk merestorasi ingatan kita terhadap pentingnya dampak perjuangan buruh bagi kehidupan kita hingga sekarang.

Melalui teori yang dirumuskan seorang ilmuwan Marxis, Antonie Pannekoek, artikel ini berusaha membedah perlawan buruh Sarbupri tahun 1950 dengan teori serikat pekerja yang dikemukakannya. Pannekoek menulis idenya setelah Eropa luluh lantak dan umat manusia menjadi miskin akibat perang dunia. Menurut Pannekoek, setelah keruntuhan ini, para pekerja di dunia harus mengatur sistem industri agar terbebas dari kemiskinan dan eksploitasi. Tugas mereka adalah mengambil alih pengelolaan produksi barang-barang (Pannekoek, 2003:5). Dalam konteks Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 1945, pengorganisasian serikat buruh mulai bangkit kembali untuk melawan perusahaan-perusahaan asing yang masih menjadi penguasa di berbagai sektor industri.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat menarasikan sejarah pergerakan nasional yang berasal dari kalangan buruh, akar rumput, dan proletariat. Melalui penelitian ini dapat diidentifikasi kondisi buruh perkebunan yang dapat memicu pemogokan yang diorganisasi oleh Sarbupri tahun 1950, bagaimana proses pengorganisasian pemogokan kerja, dan bagaimana keterkaitan pengorganisasian buruh oleh Sarbupri dengan teori serikat pekerja Antonie Pannekoek. Kondisi pasca kemerdekaan dimana Sarbupri dapat mengorganisasi 700.000 buruh ini juga menunjukkan kekuatan solidaritas yang turut serta membangun Indonesia pasca kemerdekaan melawan kekuatan kolonialisme dan imperialisme yang masih berusaha untuk berkuasa. Selain itu, temuan dalam penelitian ini juga menjadi sebuah penanda bagi kekuatan buruh yang patut diperhitungkan dan menjadi inspirasi untuk persatuan ketika dihadapkan dengan kekuatan-kekuatan eksploitatif bahkan hingga sekarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tahapan metode sejarah. Metode sejarah yang akan diimplementasikan terdiri atas penentuan topik, penemuan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1969:62-220). Data yang didapatkan kemudian akan dianalisis menggunakan teori serikat pekerja karya Antonie Pannekoek dalam bukunya *Workers' Council*. Kemudian, perspektif yang ada dalam buku tersebut akan diaplikasikan untuk menjabarkan pembahasan.

Sumber sejarah yang digunakan adalah Majalah *Tenaga* dan *Warta Sarbupri*. Kedua sumber ini menjadi representasi dari perspektif Sarbupri yang mengajukan tuntutan. Sumber dari *Kedaulatan Rakjat* dan beberapa surat kabar berbahasa Belanda yang dipakai menawarkan perspektif yang lebih netral dan menyajikan pemberitaan yang seimbang antara pihak Sarbupri, *Algemeen Landbouw Syndicaat* (ALS), dan pemerintah yang dipegang oleh kabinet Natsir pada saat itu terkait dengan upaya intervensi dan mediasinya terhadap aksi pemogokan.

PEMBAHASAN

Kondisi Sosial dan Ekonomi Buruh sebelum Kemerdekaan

Sektor agrikultur atau pertanian menjadi ranah yang paling mendominasi perekonomian dan pekerjaan di Hindia Belanda pada masa sebelum tahun 1930. Sektor agrikultur turut mempekerjakan buruh paling banyak, yaitu 60% atau sekitar 20,3 juta penduduk Hindia Belanda (Thompson, 1947:117). Kelompok terbesar terdiri dari para petani yang bekerja di lahan mereka sendiri atau untuk lahan petani lain, kelompok kedua terdiri dari para pekerja di perkebunan dan transportasi, dan kelompok ketiga terdiri dari mereka yang bekerja di ranah di industri (Thompson, 1947:117).

Sistem perkebunan biasanya menjadi usaha tambahan atau pelengkap dari kegiatan pertanian pokok, terutama untuk pertanian pangan. Namun dalam perkembangannya, sistem perkebunan di negara-negara berkembang hadir sebagai bagian dari kapitalisme barat yang datang melalui sistem perekonomian kolonial. Sistem perekonomian kolonial ini memperkenalkan sistem perkebunan Eropa *(European plantation).* Sistem ini berbeda dari sistem kebun *(garden system)* yang muncul dari aktivitas masyarakat berkembang pra-kolonial (Kartodirdjo, 1991:4).

Sistem perkebunan kolonial yang terwujud ini dilakukan dalam skala besar dan kompleks, umumnya bersifat padat modal (*capital intensive*), menggunakan area tanah yang luas, memiliki organisasi tenaga kerja besar, memiliki pembagian kerja yang kompleks, menggunakan tenaga kerja upahan (*wage labour*), mempunyai struktur hubungan yang rapi, dan menggunakan teknologi modern, spesialisasi, sistem adminitrasi, dan birokrasi, serta penanaman tanaman komersial (*commercial crops*) untuk komoditas ekspor di pasaran dunia. Sistem perkebunan semacam ini berkaitan erat dengan proses eksploitasi kapitalisme, ekstraksi kolonial, dan modernisme (Kartodirdjo, 1991:4).

Eksploitasi tenaga kerja oleh kapital ini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia, dalam bingkai waktu khususnya sejak *cultuurstelsel* diterapkan, kemudian muncul gagasan liberalisasi ekonomi, hingga zaman Politik etis di Hindia Belanda, perekonomian diarahkan untuk kepentingan eksploitasi kapitalistik yang mengkomodifikasi tenaga kerja manusia sebagai sesuatu yang sangat mudah untuk digantikan dan hanya berharga sepanjang ia dapat menghasilkan barang dan jasa. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang mengarahkan Hindia Belanda menuju orientasi baru, yaitu sumber daya alam yang menjadi lebih aksesibel bagi para

kapitalis (Breman, 1989:12).

Hal ini berlanjut tidak hanya hingga akhir abad ke-19, tetapi beberapa asosiasi perusahaan Belanda bahkan masih menjadi taipan setelah Jepang menyerah hingga masa Perang Revolusi dimulai. Asosiasi perusahaan ini salah satunya adalah *Algemeen Landbouw Syndicaat* (ALS) atau Sindikat Perkebunan Umum, yaitu sebuah asosiasi perusahaan perkebunan yang terdiri dari sekitar 735 perkebunan karet, teh, kopi, kakao, dan pohon kina (Hayashi, 2004:15-16).

Setelah tahun 1930, industrialisasi yang juga erat dengan eksploitasi kapitalisme dan kolonial, seperti pertambangan dan pemrosesan hasil pertanian mulai marak dilakukan. Akan tetapi, depresi global yang terjadi pada tahun 1930-an juga membuat lebih banyak masyarakat menganggur dan tidak memiliki lahan sehingga banyak warga yang harus mencari pekerjaan penuh waktu dari pemerintah dan kemudian harus bekerja di ranah perkebunan, pertambangan, pemrosesan pertanian, dan lain-lain. Bahkan tahun 1930 dapat dikatakan sebagai titik balik dari perekonomian Indonesia, selain dari tahun 1960 dan 1990 di masa Orde Baru (Lindblad, 2000:123).

Akibat dari keadaan yang sulit ini, ide-ide pengorganisasian menjadi padam untuk sementara waktu. Masyarakat lebih mengutamakan bagaimana caranya bertahan hidup daripada berserikat dan hal ini memang wajar terjadi karena keadaan yang memaksa. Pada masa ini, kurangnya pengorganisasian di antara kaum proletariat ini menjadi salah satu hambatan dari kemajuan mereka, dan meskipun ada aktivitas pengorganisasian, hal itu umumnya dilakukan secara terpisah-pisah yang menyebabkan tidak adanya kemajuan dari identitas kolektif mereka.

Munculnya Sarbupri

Revolusi kemerdekaan menandakan masa yang baru ketika organisasi buruh mulai gencar-gencarnya bergerak kembali dan bangun dari periode lesu. Salah satu organisasi buruh yang muncul pada masa revolusi kemerdekaan adalah Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Sarbupri). Sarbupri merupakan organisasi buruh perkebunan yang pertama kali dibentuk di Kawedanan Bandjar, Priangan Timur. Salah satu pendiri dari Sarbupri adalah Suparna Sastradiredja yang juga menjadi sekretaris jenderal dari tahun 1947 hingga tahun 1965 (*Warta Sarbupri,* 10 Januari 1951). Sebelumnya, serikat buruh ini diberi nama Sarikat Buruh Perkebunan (SBP). SBP kemudian mengembangkan ranting-rantingnya di wilayah lain di Jawa Barat. Dengan nama Sarbupri ini, berturut-turut diadakan konferensi di Garut, Subang, Cirebon, dan Tasikmalaya.

Bersamaan dengan perkembangan Sarbupri, serikat buruh di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur juga turut bermunculan. Di Sumatera Timur, dengan kian menjamurnya pembukaan hutan untuk memenuhi kebutuhan perkebunan tembakau, karet, dan sawit dibentuk pula serikat bernama Persatuan Buruh Perkebunan Indonesia (Perbupi). Dengan mulai terkoneksinya jejaring serikat buruh perkebunan antar wilayah ini, Sarbupri pun menginisiasi kongres serikat buruh pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 15 hingga 17 Februari 1947. Kongres ini pun memutuskan untuk melebur serikat-serikat kecil yang tersebar di regional Jawa dan Sumatera tersebut di dalam Sarbupri. Atas peleburan ini, Sarbupri berhasil menghimpun kekuatan yang cukup besar. Pada tahun 1950, ranting-ranting yang telah terbentuk di seluruh wilayah bagian Indonesia terdiri dari 606 ranting (*Tenaga*, 25 Oktober 1950).

Data dari Kementerian Sosial Yogyakarta pada 28 Maret 1947 melaporkan bahwa Sarbupri memiliki anggota sebanyak 1 juta orang (Wolf, 1948:69). Pada tahun 1951, Sarbupri diberitakan memiliki 700.000 anggota, tetapi angka yang lebih rasional umumnya menuliskan jumlah anggota sebanyak 370.000 atau 390.000 pada Oktober 1956 (Hindley, 1964:333). Antara Mei 1962 dan Maret 1963, Sarbupri terkadang mengumumkan jumlah anggota 500.000, 1 juta, atau pun 1,5 juta.

Klaim yang paling sering dikemukakan adalah 500.000 (Hindley, 1964:333).

Pada bulan Agustus hingga September tahun 1950, Sarbupri melancarkan tuntutan untuk kenaikan gaji buruh dengan skala yang besar, yaitu seluruh Jawa dan sebagian Sumatera. Selain itu, juga disampaikan tuntutan terkait kebebasan melakukan ibadah menurut agama yang dianut oleh masing-masing pekerja (*Tenaga*, 25 Oktober 1950). Tuntutan Sarbupri ini disampaikan melalui Panitia Tuntutan Pusat yang nantinya juga menjadi Pimpinan Pusat Pemogokan. Panitia Tuntutan Pusat (Panitia Pusat Pemogokan) ini berjumlah 9 orang (*Tenaga,* 25 Oktober 1950).

Di masa itu, gaji rata-rata yang diterima oleh buruh hanya berkisar *f* 0,45 hingga *f* 2 (*Tenaga,* 25 Oktober 1950). Sedangkan tarif-tarif upah yang diterima oleh buruh yang tergabung dalam Sarbupri di berbagai daerah di Jawa antara lain adalah *f* 0,55, *f* 0,60, *f* 0,70, *f* 0,80, *f* 1, *f* 1,20, hingga *f* 2,50. Buruh perkebunan juga tidak menerima subsidi pembagian beras, ikan asin, atau garam, melainkan harus membelinya dengan potongan atau dengan harga penuh.

Upah yang diterima ini jelas tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, apalagi bagi buruh yang telah berkeluarga dan mempunyai anak. Ketidaksesuaian pemberian upah dengan ketetapan yang ada juga membuat kondisi buruh makin terpuruk; di Priangan Timur misalnya, upah standar yang ditetapkan adalah *f* 2 sehari, tetapi di perkebunan-perkebunan masih terdapat buruh yang menerima gaji lebih rendah daripada itu (*Tenaga,* 25 Oktober 1950).

Kondisi ini menyebabkan banyaknya desakan untuk memperbaiki keadaan dari para buruh perkebunan hingga pada kongres kedua Sarbupri pada tanggal 20-23 Mei 1950 di Sukabumi, ditetapkanlah keputusan bahwa:

> "Mengadakan segala aktiviteit jang legal. supaja dalam tempo *jang singkat* deradjat penghidupan dan upah Buruh perkebunan dinaikkan menudju suatu ukuran hidup jang lajak sebagai manusia, bagi ia (Buruh) dan keluarganja" (*Tenaga,* 25 Oktober 1950).

Kemudian berdasarkan pertimbangan di atas, maka kongres kedua Sarbupri ini resmi menetapkan tuntutan:

> "Atas dasar pikiran2 diatas, maka ditetapkan upah *f* 3,50 sehari (terendah). Angka ini adalah diselaraskan kepada keputusan Pemerintah R.I. dalam P.G.P.-nja" (*Tenaga,* 25 Oktober 1950).

Inilah tuntutan yang akhirnya menjadi penggerak dalam pemogokan Sarbupri tahun 1950. Selain karena itu, beberapa hal yang turut melatarbelakangi pemogokan adalah kondisi ekonomi yang tidak juga membaik dan selama revolusi kemerdekaan, hampir tidak pernah terjadi kenaikan upah bagi buruh (*Tenaga,* 25 Oktober 1950). Kemudian, harus diakui bahwa meskipun tuntutan ini murni mengggambarkan keinginan untuk dan perbaikan nasib anggota, tetapi asosiasi perusahaan di mana tuntutuan ini akhirnya dilayangkan, yaitu ALS yang masih dikuasai oleh pihak Belanda juga menjadi bahan bakar dalam semangat melawan kolonialisme. Sehingga dapat dikatakan, pemogokan Sarbupri menjadi suatu hibrida dalam manuvernya, yaitu untuk memperbaiki nasib anggota dan juga bernapaskan semangat anti imperialis dan nasionalisme.

Pernyataan Tuntutan

Perwakilan dari Panitia Tuntutan Pusat (Panitia Pusat Pemogokan) pertama kali bertemu dengan pihak ALS pada 5 Juli 1950 dan pada tanggal 7 Juli 1950, tuntutan kemudian disampaikan oleh pimpinan Sarbupri kepada *Algemeen Landbouw Syndicaat* (ALS) dan *Ondernemersbond* sebagai kedua direksi tertinggi dari setiap *onderneming* atau asosiasi perusahaan di Hindia Belanda yang masih bertahan pada saat itu. Terdapat masa berunding yang cukup panjang antara pihak Sarbupri

dan direksi asosiasi perusahaan. Namun ketika sampai tanggal 17 Agustus 1950, 41 hari sejak awal diajukannya tuntutan pun tidak didapati kesepakatan antara kedua pihak, Sarbupri memberikan ultimatum terakhir sampai tanggal 18 Agustus pukul 12.00 siang (*Tenaga,* 25 Oktober 1950).

Ultimatum Sarbupri tersebut disambut dengan rancangan ketetapan larangan mogok di perusahaan-perusahaan vital yang disusun dalam peraturan militer No. 12 dan sempat dibicarakan oleh Gubernur Militer IV Jawa Barat, Kolonel Sadikin. Rencana penetapan peraturan ini dilakukan karena masih diterapkannya undang-undang dalam keadaan bahaya perang (*Kedaulatan Rakjat*, 22 Juli 1950). Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) kemudian mengambil tindakan untuk merundingkan kembali permasalahan peraturan larangan mogok ini dengan mengadakan pertemuan di wakil kantor Penyuluh Perburuhan. Dalam pertemuan ini, SOBSI berusaha meyakinkan pihak pemerintah bahwa mereka bersedia mengubah siasatnya (*Kedaulatan Rakjat*, 22 Juli 1950).

Malam setelah larangan pemogokan tersebut diubah, dilangsungkan kembali konferensi pers oleh Komisaris Sarbupri wilayah Sumatera Selatan, S. Panhar, bersama dengan Penyuluh Perburuhan, Anwar Ney, dan seorang Kepala Jawatan Penerangan Provinsi. S. Panhar mengemukakan kemungkinan dilakukannya pemogokan oleh buruh pada tanggal 20 Agustus 1950 karena tidak ada sambutan baik dari pihak ALS yang telah melakukan perundingan dengan Sarbupri bahkan sejak 2 bulan yang lalu. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa Sarbupri regional Sumatera Selatan akan patuh pada pimpinan di Jawa dan menyatakan rasa solidaritasnya dengan turut melakukan pemogokan (*Kedaulatan Rakjat*, 22 Juli 1950).

Surat penentu terakhir yang diterima oleh Sarbupri dari ALS dan *Ondernemersbond* pun datang beberapa saat sebelum pukul 12.00 pada hari Jumat, 18 Agustus 1950—tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Sarbupri. Surat ini berisi keputusan yang menolak tuntutan dari Sarbupri dan juga mengenai hasil perundingan yang terakhir dilakukan. Dalam hasil perundingan yang terakhir ini, Sarbupri tidak lagi menuntut upah standar *f* 3,50 sehari, melainkan berkompromi dengan menurunkan tuntutannya menjadi *f* 2,75 di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan *f* 3,25 di Jawa Barat (*Kedaulatan Rakjat*, 22 Juli 1950). Dalam suratnya, Pihak ALS tetap tidak menerima tuntutan dari Sarbupri. ALS hanya menyetujui untuk menaikkan upah *f* 2,25 untuk buruh di daerah Jawa Barat dan *f* 2 untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keputusan ini akhirnya menjadi titik puncak dari pecahnya pergolakan antara Sarbupri dan ALS.

Akibat dari penolakan ini dan desakan para buruh di daerah-daerah, pucuk pimpinan pusat Sarbupri pun mengeluarkan mandat pada hari Minggu, 20 Agustus 1950 pukul 12.30 siang untuk melakukan pemogokan. Diberitakan bahwa 700.000 buruh perkebunan yang tergabung dalam Sarbupri dari Jawa dan Sumatera akan segera melaksanakan perintah tersebut pada hari yang telah ditetapkan dan ada pula yang melakukannya pada besok hari dan lusa (*Kedaulatan Rakjat*, 22 Juli 1950).

Pada tanggal 29 Agustus 1950, pimpinan pusat Sarbupri merilis pernyataan agar pemogokan terus dilakukan karena sikap ALS yang tidak mau berubah. Posisi ini ditetapkan sebagai jawaban atas sikap ALS yang hanya ingin melanjutkan perundingan atas upah umum pekerja yang diinginkannya, yaitu *f* 2,00 untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan *f* 2,25 untuk Jawa Barat. Manajemen ALS juga sama sekali belum memberikan jawaban pasti atas berbagai poin dalam surat Sarbupri. Mereka juga menolak setiap keputusan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan pendiriannya. Sedangkan di sisi lain, Sarbupri terbuka untuk menerima keputusan pemerintah yang adil terkait perselisihan ini (*Kedaulatan Rakjat*, 22 Juli 1950).

Perundingan dan Keputusan Akhir

Intervensi pemerintah akhirnya datang pada Selasa, 12 September 1950. Sejak pukul 10 pagi, delegasi Sarbupri yang terdiri dari Pimpinan Pusat bernama Engkun Coerdian, Sumantri perwakilan dari Jakarta, Pandi perwakilan dari Subang, Pandar perwakilan dari Palembang, dan Suhandar perwakilan dari Bogor telah bersiap. Sedangkan dari pihak ALS hanya diwakili oleh satu delegasi di bawah pimpinan De Vries. Pihak Kementrian Perburuhan yang menjadi mediator dalam perundingan ini antara lain Mr. Sumarno, Surasto, dan Mr. Suprapto. Perundingan ini menjadi perundingan pertama yang dilakukan setelah perundingan yang berujung pemogokan berkepanjangan pada tanggal 17 Agustus 1950. Dalam perundingan ini, Sarbupri menawarkan jalan tengah dengan mengurangi tuntutan upah menjadi *f* 3 sehari (*Kedaulatan Rakjat*, 13 September 1950).

Pada hari Selasa yang menentukan tersebut, akhirnya dicapai kesepakatan antara Pimpinan Pusat Sarbupri, ALS, dan Zuiden West Sumatera Syndicaat (*Kedaulatan Rakjat*, 13 September 1950). Kesepakatan ini pun secara berangsur-angsur menyelesaikan masalah pemogokan yang dilakukan di Jawa dan Madura, serta Sumatera Selatan dan Barat. Segera sesudah penandatanganan, Ketua Umum Pucuk Pimpinan Sarbupri, E. Cordian, langsung mengeluarkan perintah agar para buruh perkebunan kembali bekerja (*Kedaulatan Rakjat*, 13 September 1950).

Rincian dari kesepakatan yang telah dicapai antara Sarpubri, ALS, dan Zuiden West Sumatera Syndicaat yang mengakhiri pemogokan selama 38 hari ini adalah sebagai berikut (*Kedaulatan Rakjat*, 13 September 1950):

a. Upah terendah R. 3.- sehari ditambah dengan pemberian tjatu [subsidi bantuan langsung pokok] pertjuma.
b. Upah istirahat (Minggu) R. 2.-
c. Upah selama mogok 50% atas dasar upah baru.
d. Upah bulanan terendah R. 130.- ditambah pemberian tjatu pertjuma

Teori Serikat Pekerja Antonie Pannekoek dalam Lingkup Indonesia

Dalam bukunya, *Workers' Council,* Antonie Pannekoek menjabarkan bahwa serikat pekerja yang dimaksud merupakan bentuk dari *self-governance* atau otonomi atas diri sendiri yang akhirnya akan menggantikan pemerintahan di dunia lama. Tujuan dari serikat pekerja yang dibentuk adalah agar kehidupan dan pekerjaan terjadi secara harmonis dan manusia dapat mengendalikan kehidupannya tersebut di tangannya sendiri. Melalui tujuan ini, kebutuhan untuk bekerja diambil alih oleh kebebasan, dan peraturan-peraturan ketat akan lenyap menjadi perilaku spontan akibat adanya kesadaran oleh individu tersebut (Pannekoek, 2003:44).

Serikat pekerja yang dirumuskan oleh Pannekoek adalah serikat kerja berbentuk dewan pekerja. Dewan pekerja ini merupakan bentuk dari organisasi di masa transisi ketika para kelas pekerja berjuang melawan dominasi. Dewan pekerja juga merupakan bentuk pengorganisasian diri untuk menghancurkan kapitalisme, serta mengorganisasi produksi sosial untuk mewujudkan tujuannya tersebut (Pannekoek, 2003:44).

Karakter dari dewan pekerja dalam pengertian Pannekoek adalah dewan atau komite yang tidak memiliki politisi dan pemerintahan. Mereka merupakan *messenger* atau pembawa pesan, pertukaran opini, tujuan-tujuan, dan keinginan dari kelompok pekerja. Mereka juga mengambil peran dalam diskusi dan berperan sebagai juru bicara dari pemikiran-pemikiran utama. Sebagai delegasi, mereka tidak hanya dapat membela pemikiran-pemikiran tersebut, tetapi juga memiliki motif yang tidak bias sehingga dapat mengangangkat argumen-argumen lain yang muncul. Hal ini

menjadikan mereka sebuah organ dari hubungan dan diskursus sosial (Pannekoek, 2003:45-46). Demi mencapai dunia dengan otonomi sendiri bagi para pekerja tersebut, Pannekoek merumuskan 3 tahapan dari perlawanan buruh, yaitu tugas yang harus dilakukan oleh buruh (*The Task*), perjuangan para buruh (*The Fight*), musuh yang harus dihadapi para buruh (*The Foe*).

Tugas para Buruh (*The Task*)

Menurut Pannekoek, pekerjaan yang berada di bawah kapitalisme secara esensial merupakan sistem yang mengisap. Para buruh bekerja dengan memerah tenaganya secara dipecut atau dengan dirayu. Kemudian, modal yang dimiliki oleh majikan itu sendiri adalah sesuatu yang ketat karena apabila ia tidak dapat bersaing, maka sebuah usaha akan ambruk. Oleh karena itu, di bawah tekanan untuk mempertahankan modal ini, pekerja akan secara naluriah melakukan perlawanan karena apabila tidak, maka semua yang dimilikinya akan dirampas dan dihisap (Pannekoek, 2003:8).

Hal ini merupakan dasar dari semua demonstrasi, perlawanan, perjuangan, pembangkangan, dan pemogokan buruh, yaitu menentang perampasan, penghisapan, dan pemerasan yang dilakukan oleh modal kapital di bawah sistem eksploitatif dari kapitalisme. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini merupakan bagian dari penjelasan mengapa pemogokan buruh terjadi. Ketika buruh Sarbupri yang diperas tenaga kerjanya tidak diberikan upah yang layak sesuai tenaga kerja yang dikeluarkannya dan tidak diperlakukan sebagaimana mestinya setelah pertukaran kapital antara pekerja dan majikan telah dilakukan, maka *counter-pressure* atau perlawanan balik terhadap tekanan yang ada pun terjadi.

Keadaan semacam ini haruslah didukung dengan perubahan hukum. Tidak hanya perubahan hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang bersifat normatif dalam diri masyarakat dan berdiri atas asas keadilan sosial karena hal ini lah yang paling menentukan. Sarbupri sendiri pernah membawa kasus pemogokan ini ke ranah parlementer, meskipun mereka tidak mempercayai *status quo* dan menganggap bahwa parlemen adalah suatu komedi omong, tetapi di atas panggung komedi omong ini pula Sarbupri dapat "ikut ngomong dan membela pendirian kelas Buruh dimuka parlement sebagai panggung propaganda: di mana kawan Ahem Erningpradja dapat membeberkan benarnja, adilnja, kuat-alasanja, lajaknja dsb. dsb. tuntutan Sarbupri serta tidak betulja, tidak benarja, kolonialistisnja, sipat pengatjaunja pendirian A.L.S." (Pannekoek, 2003:8).

Selama hukum dan keadilan sosial berarti eksploitasi, opresi, dan objek kompetisi bagi kelas pekerja, maka selama itu pula lah kenyataan ini akan terus terjadi. Pemogokan, contohnya dalam kasus Sarbupri, merupakan salah satu cara untuk menentang dan mengajukan banding terhadap hal ini. Sokongan serta dukungan yang diterima oleh Sarbupri menunjukkan bahwa kelas pekerja mulai menyadari terdapat pola yang tidak wajar dalam masyarakat dan telah mengakar kuat serta perlahan-lahan harus dicabut.

Fondasi dari masyarakat yang baru adalah persahabatan dan solidaritas, kedisiplinan dan antusiasme, dorongan untuk mengorbankan diri dan kesetiaan terhadap komunitas, kekuatan pengetahuan, keberanian dan ketangguhan; sebuah organisasi yang mengikat semua kemampuan ini menjadi sebuah tujuan, dan semua hal tersebut datang dari hasil perjuangan kelas. Fondasi ini tidak dapat sengaja dibangun dan dipersiapkan dari awal. Ia lahir secara spontan berdasarkan pengalaman eksploitasi yang dialami oleh para pekerja dan ia tumbuh dari kebutuhan para pekerja untuk berjuang (Pannekoek, 2003:19).

Organisasi seperti Sarbupri akhirnya merefleksikan karakter dari apa yang mereka kerjakan. Organisasi seperti Sarbupri juga kemudian dapat disebut sebagai organisasi dewan yang sangat berlawanan dengan parlementerisme. Sarbupri tidak memiliki politisi ataupun pemerintahan.

Mereka adalah pembawa pesan dan penukar opini, tujuan, dan kehendak dari cabang-cabang dan ranting-ranting dari para pekerja di mana diskusi terjadi, seperti yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya, setelah para pekerja merasa mereka dapat menjadi tuan bagi dirinya sendiri, kinerjanya, dan hasil kerjanya, maka mereka dapat mengembangkan kekuatan dan mengembangkan keinginan untuk menyingkirkan penderitaan dan kemelaratan, mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan, dan menghancurkan kemiskinan dan kejahatan yang diwariskan oleh kapitalisme (Pannekoek, 2003:51).

Perjuangan para Buruh (*The Fight*)

Perjuangan para buruh merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari karena ketika para pekerja masuk ke dalam sistem kapitalisme, tak urung eksploitasi pasti akan dijumpai. Hal ini dapat berupa faktor fisik dan non-fisik karena pemilik modal akan selalu berusaha untuk menjaga akumulasi kapitalnya dengan berbagai cara. Hal ini mencakup monopoli, normalisasi kesadaran kelas pekerja terhadap eksploitasi, penggunaan teknologi yang merusak lingkungan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain. Hal ini lah yang menyebabkan kita menyaksikan berbagai pemberontakan pekerja dari generasi ke generasi.

Bagi mereka, perjuangan untuk meningkatkan kondisi kerja adalah kebutuhan segera karena sang majikan, dalam tekanan untuk berkompetisi, akan selalu berusaha untuk memperbanyak keuntungan, menurunkan pendapatan pekerjanya, dan meningkatkan jam kerja selama mungkin. Para pekerja mungkin akan mengalami demoralisasi di awal, tetapi ketika perlawanan mulai meletus dalam bentuk yang paling memungkinkan, yaitu ketidakmauan untuk bekerja atau pemogokan, maka di sini lah para pekerja akan menemukan kekuatan. Dari pemogokan ini muncul asosiasi para pekerja dari berbagai pabrik, cabang, dan desa. Dari pemogokan juga muncul perasaan solidaritas dan praktik saling membantu yang muncul secara spontan. Bantuan yang awalnya bersifat sementara ini merupakan fondasi pertama dari terciptanya serikat pekerja (Pannekoek, 2003:51).

Metode baru pun muncul seraya terbentuknya kekuatan baru dari para buruh ini. Kekuatan baru ini bernama aksi langsung yang berarti aksi dari para pekerja tersebut tanpa diperantarai oleh serikat pekerja. Aksi ini juga disebut sebagai pemogokan liar karena berbeda dengan protes yang diumumkan oleh serikat pekerja resmi. Namun perlawanan semacam ini biasanya menghasilkan kegagalan sehingga perjuangan dari pekerja tidak mungkin dilakukan tanpa organisasi. Organisasi ini pun harus dilakukan secara swa-manajerial atau dipimpin oleh para pekerja dan segala inisiatif dan keputusan diambil oleh mereka sendiri. Meskipun begitu, tetap dibutuhkan komite pemogokan untuk karena tidak semua hal dapat dilakukan bersamaan. Oleh karena itu, perlu ada pendistribusian peran, perancangan langkah, dan pemutusan tindakan yang dilakukan secara langsung (Pannekoek, 2003:64).

Hal ini terlihat jelas dalam terbentuknya organisasi Sarbupri dan langkah-langkah yang diambil menuju pemogokan tahun 1950. Sarbupri memiliki komite atau yang disebut Panitia Tuntutan Pusat (Pimpinan Pusat Pemogokan) yang terdiri dari 9 orang sebagai delegasi dari pemogokan yang juga mengantarkan mereka untuk bersuara di depan parlemen (*Tenaga,* 25 Oktober 1950). Panitia ini pula yang melakukan pertemuan dengan pihak yang dituntut, yaitu ALS, dan menyampaikan pernyataan yang telah disetujui secara kolektif kepada mereka terkait tuntutan kenaikan upah (*Tenaga,* 25 Oktober 1950).

Kemudian hal yang paling utama dalam aksi langsung adalah propaganda untuk memperluas pemogokan. Tekanan terhadap kapital harus ditingkatkan karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyesuaikan diri dengan besarnya kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Para kapitalis mengetahui ini dengan sungguh-sungguh, bahwa konsesi hanya akan mereka lakukan karena mereka takut bahwa pemogokan ini akan menyebar secara universal (Pannekoek, 2003:62).

Ketika kita berbicara kembali mengenai Sarbupri, propaganda merupakan salah satu alat yang dipergunakan dan yang paling menguntungkan bagi aksi pemogokan besar-besaran yang mereka lakukan. Propaganda ini bahkan disusun secara strategis dengan mengembangkan dua metode, yaitu propaganda ke dalam dan propaganda keluar. Hal ini juga memberikan kesempatan untuk Sarbupri memperkuat kekuatan moral untuk tetap mempertahankan perjuangan sekaligus juga mendapatkan dukungan dari pihak luar.

Propaganda ke dalam dilakukan untuk mengorganisasi tim pemogokan, mencegah timbulnya berbagai provokasi dari kaum reaksioner, serta memperkuat semangat juang para pemogok. Sedangkan propaganda keluar ditujukan untuk menarik simpati publik agar dapat memberikan sokongan baik moral maupun material (*Tenaga,* 25 Oktober 1950). Selain itu, pemogokan Sarbupri juga didahului dengan *pers-campagne* yang bertepatan harinya dengan diajukannya tuntutan kepada ALS dan *Ondernermersbond*. Kampanye pers ini ditujukan untuk menunjukkan fakta dari perspektif Sarbupri mengenai kelayakan tuntutan kenaikan upah yang dilayangkan. Sarbupri juga mengharapkan bantuan dari kaum buruh lain dan masyarakat umum (*Tenaga,* 25 Oktober 1950).

Inilah yang menjadikan pemogokan kecil yang berubah menjadi besar membutuhkan transformasi menuju bentuk baru. Komite pemogokan, dalam hal ini Panitia Tuntutan Pusat (Pimpinan Pusat Pemogokan) dibentuk dari delegasi-delegasi sebagai bentuk keberlanjutan dari keadaan. Komite pemogokan semacam ini berbeda dari pimpinan pusat resmi karena mereka telah menunjukkan karakteristik dari dewan serikat pekerja. Hal ini bukan berarti serikat pekerja semata-mata digantikan oleh dewan pekerja yang spontan semacam ini. Ini juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengoreksi banyaknya serikat buruh yang memiliki watak kompromis akibat struktur organisasinya yang tidak demokratis.

Akhirnya, revolusi di mana kelas pekerja akan mendapatkan kebebasan dan kekuatan tidak dapat diperjuangkan dalam durasi yang terbatas dan hanya dilakukan dalam satu dua kali pemogokan. Namun dalam proses organisasi dan pembelajaran dirilah para pekerja dapat perlahan-lahan mengembangkan kemampuan untuk menaklukkan kelompok borjuis, menghancurkan kapitalisme, dan membangun sistem baru dari produksi berbasis kolektif. Hal ini karena kapitalisme bukan merupakan sistem yang normal dan stabil. Esensi kapitalis merupakan perkembangan, aktivitas, ekspansi dan apabila ia berhenti, maka semuanya akan ambruk dan mengalami krisis. Proses perlawanan ini pun akan memakan waktu sepanjang sejarah yang tidak diketahui panjangnya (Pannekoek, 2003:83-84).

Praktik revolusi para pekerja berasal dari perasaan komunal. Proses ini berasal dari pertumbuhan solidaritas, hubungan bersama, dan persatuan dari para pekerja. Kebajikan dari solidaritas dan kesetiaan, serta aksi bersama yang muncul dari perjuangan sosial merupakan fondasi dari sistem ekonomi yang baru. Selain itu, perjuangan ini juga akan membentuk jenis manusia baru yang dibutuhkan oleh sistem yang bukan lagi diperas dan dihisap tenaga kerjanya (Pannekoek, 2003:87-88).

Musuh para Buruh (*The Foe*)

Tuntutan untuk menaikkan gaji buruh ini dilayangkan kepada *Algemeen Landbouw Syndicaat* (ALS) atau Gabungan Perusahaan Umum Pertanian. *Algemeen Landbouw Syndicaat* (ALS) didirikan pada 24 Juli 1925 dalam suatu kongres selama tiga hari, yaitu tanggal 22-24 Juli 1925 (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië,* 25 Juli 1925).

Pada masa ini, isu ekspansi privatisasi ekonomi di Hindia Belanda dapat dikatakan kalah populer dibandingkan praktik Politik Etis yang mulai diselenggarakan. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan swasta dan asosiasi bisnis milik Belanda masih tetap menanamkan investasi dan membangun pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan di tanah jajahannya. Salah satu perusahaan besar ini adalah ALS, bahkan ALS dianggap sebagai perusahaan yang kuat dan disegani pada masa itu (Aprianto, 2016:65).

Akibat adanya pergeseran penguasaan modal ini, kelas borjuasi muncul sebagai penopang utama dari perekonomian kapitalisme perusahaan perkebunan. Mereka juga berhasil mensentralisasikan dan mengonsentrasikan modal sehingga dapat menjadi fondasi bagi mereka untuk mengakumulasi kapital (Aprianto, 2016:65). Gurita borjuasi, seperti yang kita tahu, tidak akan pernah puas dengan modal yang sudah terkumpul sehingga selalu ada ruang untuk eksploitasi dalam sistem ekonomi kapitalistik, apalagi yang baru diperkenalkan ke tanah jajahan ini setelah periode *cultuurstelsel* diberhentikan.

Kolonialisme dan kapitalisme yang saling berkaitan satu sama lain dalam perihal Hindia Belanda pada saat itu masih kurang banyak diteliti. Namun beberapa peneliti seperti Maarten Kuitenbrouwer and Huibert Schijf (1998) telah mencoba untuk menguraikan bagaimana hal ini berdampak pada perekonomian pada periode tersebut. Kuitenbrouwer dan Schijf memberikan istilah "*regenten* capitalism" atau "kapitalisme kebangsawanan" untuk Hindia Belanda dengan melihat pada aspek sektor yang berkembang dan kenampakan sosio-kultural yang ada.

Namun, kapitalisme kebangsawanan tidak dapat dikatakan relevan lagi di masa pemogokan Sarbupri dan hanya menjadi basis dari keberadaan ALS yang menjadi musuh dari buruh. Dalam pemogokan Sarbupri, musuh utama mereka adalah kapitalisme pasca kolonial yang masih bercokol setelah kemerdekaan Indonesia. Asosiasi perusahaan kapitalis dari zaman kolonial ini juga merupakan sebuah kendaraan yang dipakai sebagai alat untuk memastikan imperialisme dalam bentuk ekonomi akan tetap bertahan di masa depan (Breman, 2024:180).

Kapitalisme pasca kolonial ini berbuntut dari penolakan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia pada 1945. Dewan Perusahaan Hindia Belanda di Den Haag dan *Indische Ondernemersbond* (Persatuan Pengusaha Hindia Belanda) mengikuti secara rinci perjanjian Linggajati dan melakukan lobi untuk mempertahankan perusahaan mereka. Dewan tersebut tidak mempunyai kontak resmi dengan partai politik tetapi mengandalkan hubungan pribadi dengan pimpinan mereka (Breman, 2024:180).

Dari sini, perusahaan Belanda yang tersisa dari masa kolonial dapat tetap bertahan. ALS sebagai asosiasi perusahaan yang paling disegani merupakan salah satu dari asosiasi yang mampu beroperasi dan mempekerjakan orang-orang bumiputera hingga nasionalisasi. Dari sini pula lah, musuh dari para buruh, yaitu kapitalisme pasca kolonial muncul dan akhirnya menggerakan massa Sarbupri untuk melakukan pemogokan pada 20 Agustus hingga 26 September 1950 itu dalam rangka menuntut hak mereka untuk kenaikan upah yang kemudian berdampak pada kehidupan yang lebih layak.

KESIMPULAN

Perjuangan rakyat dari kelas proletar Hindia Belanda yang pernah berkobar di awal abad ke-20 sempat padam di masa depresi dan represifitas kolonial. Namun, ia kembali menemukan kebangkitannya pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sarbupri merupakan salah satu serikat buruh yang dibentuk pada 1946 dan segera menemukan massanya. Bahkan pada 1950, telah terbentuk 606 cabang dan ranting di berbagai wilayah Indonesia.

Sarbupri merupakan organisasi yang tergolong radikal dalam manuvernya. Pada tahun 1950, Sarbupri menggerakkan 700.000 buruh perkebunan untuk melakukan pemogokan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Pemogokan ini dipicu oleh tuntutan utama yaitu kenaikan upah dan kebebasan mempraktikkan agama bagi para buruh sebagai tuntutan sampingan. Tuntutan ini dilayangkan kepada *Algemeen Landbouw Syndicaat* (ALS), yaitu sebuah asosiasi perusahaan perkebunan yang masih beroperasi pasca kemerdekaan Indonesia.

Sarbupri pertama kali menyatakan tuntutan pada 7 Juli 1950, tetapi hal ini tidak digubris oleh pihak ALS bahkan hingga pertengahan bulan Agustus. Hal ini menyebabkan Sarbupri memberikan ultimatum pada 18 Agustus 1950 yang menyebutkan bahwa apabila tuntutan tidak dipenuhi sampai pukul 12.00 siang, maka pemogokan besar-besaran akan dilakukan di seluruh pulau Jawa dan sebagian pulau Sumatera. Pemogokan pun resmi dilakukan oleh buruh-buruh pada 20 Agustus 1950.

Akhirnya pada 26 September 1950, setelah 38 hari pemogokan dilakukan lah perundingan terakhir yang menentukan hasil dari perjuangan buruh selama ini, yaitu upah terendah adalah R. 3.- sehari ditambah dengan pemberian subsidi, upah istirahat atau pada hari minggu adalah R. 2.-, upah selama mogok adalah 50% atas dasar upah baru, dan upah bulanan terendah adalah R. 130.- ditambah pemberian subsidi. Meskipun tidak sesuai dengan tuntutan awal, yaitu upah buruh sebanyak f 3,50 sehari, tetapi perundingan akhir ini tetap disetujui oleh Sarbupri.

Selama proses pengorganisasian, Sarbupri memanfaatkan berbagai cara untuk membuat suara tuntutannya terdengar hingga ke berbagai kalangan. Hal ini dilakukan untuk menarik simpati, dukungan, dan sokongan material maupun non-material. Proses ini dilakukan melalui pembangunan solidaritas, khususnya dengan serikat buruh lain, seperti Sarikat Buruh Kapal dan Pelabuhan (SBKP) dan Rukun Tani Indonesia (RTI).

Dari segi struktural serikat, Sarbupri banyak melakukan propaganda untuk membentuk dukungan massa melalui penyiaran (publikasi) dan penerangan (informasi, agitasi, propaganda). Penyiaran dilakukan khususnya ke dalam internal organisasi Sarbupri untuk mencegah adanya provokasi dan memperkuat moral buruh. Sedangkan penerangan dilakukan keluar untuk menarik simpati dan membentuk opini publik mengenai pemogokan Sarbupri. Selain itu, gelar pers juga dilakukan untuk mengabarkan adanya pemogokan. Metode yang dilakukan antara lain melalui surat-surat selebaran, poster-poster, siaran-siaran kilat, pidato-pidato di radio, rapat-rapat anggota, dan sebagainya.

Selanjutnya, sesuai dengan teori serikat pekerja Antonie Pannekoek, pemogokan ini dikaji melalui tiga aspek, yaitu tugas para buruh (*The Task*), perjuangan para buruh (*The Fight*), dan musuh para buruh (*The Foe*). Dalam aspek tugas para buruh (*The Task*), terdapat 8 aspek mengenai buruh, hukum dan kepemilikan, pengorganisasian pertokoan, pengorganisasian sosial, melampaui halangan, menghadapi kesulitan, pengorganisasian dewan, dan perkembangan.

Kemudian dalam perjuangan buruh (*The Fight*), terdapat 5 aspek yang dikaji, yaitu serikat pekerja, aksi langsung, demonstrasi politis, revolusi Rusia, dan revolusi pekerja. Terakhir, pada bagian musuh yang harus dihadapi para pekerja (*The Foe*), aspek yang dikaji oleh Pannekoek sendiri adalah borjuisme. Peneliti pun datang pada kesimpulan bahwa musuh dari buruh pada periode tersebut adalah "kapitalisme *regente*" atau "kapitalisme kebangsawanan" yang diturunkan menjadi "kapitalisme pasca kolonial" sesuai dengan ruang dan waktu pemogokan yang dilakukan oleh Sarbupri, yaitu pada tahun 1950.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Surat Kabar

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 25-7-1925.

Kedaulatan Rakjat, 22-7-1950; 13-9-1950; 15-9-1950; 27-9-1950.

Tenaga, 25-10-1950.

Warta Sarbupri, 10-1-1951.

Buku dan Jurnal

Aprianto, Tri Chandra. 2016. *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember*. Sleman: STPN Press.

Breman, Jan. 1989. *Taming the Coolie Beast: Plantation Society and the Colonial Order in Southeast* Asia. Delhi: Oxford University Press.

Breman, Jan. 2024. *Kolonialisme, Kapitalisme, Rasisme: Kronik pascakolonial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Gardner, Leigh & Roy, Tirthankar. 2020. *The Economic History of Colonialism*. UK: Bristol University Press.

Gottschalk, Louis. 1969. *Understanding History*. New York: Random House Inc.

Hayashi, Yoko. 2002. "Agencies and Clients: Labour Recruitment in Java, 1870s-1950s." *CLARA Working Paper,* No. 14.

Kartodirdjo, Sartono. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.

Kuitenbrouwer, Maarten & Schijf, Huibert. 1998. "The Dutch Colonial Business Elite at the Turn of the Century." *Itinerario*, No. 22.

Lindblad, J. Thomas. 2000. "Structural Origins of the Economic Depression in Indonesia During the 1930s" dalam Peter Boomgard & Ian Brown (eds.), *Weathering the storm: the economies of Southeast Asia in the 1930s depression*. Leiden: KITLV Press.

Pannekoek, Antonie. 2003. *Workers' Council.* Melbourne: AK Press.

Thompson, Virginia. 1947. *Labor Problems in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.

Wolf, Jr., Charles. 1948. *The Indonesian Story*. New York: The John Day Company.